

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Pasal 21; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 120-122.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 40; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Buku II tentang Perikatan, Bab Hibah; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 135-137.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 150-155; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Badan Pertanahan Nasional, Pedoman Pelaksanaan Tertib Hukum Pertanahan, Jakarta: BPN, 2018.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 14 dan 15; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 170-175.
- UUPA Pasal 6, 7, 10, dan 17; Badan Pertanahan Nasional, Landreform dan Penataan Penguasaan Tanah, Jakarta: BPN, 2015, hlm. 45-50.
- UUPA Pasal 2; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 180-183.
- UUPA Pasal 19; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 dan 40; Badan Pertanahan Nasional, Pedoman Pendaftaran Tanah, Jakarta: BPN, 2018.

Literatur Buku

- Mardansyah. (2020). Analisis Prosedur Administrasi Peralihan Hak Atas Tanah Hibah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 5(1), 50–59.
- Sintya, M. (2024). Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah di Notaris dan PPAT Dr. Mahmud, S.H.,M.Kn. *Bevinding*, 1(10), 12–22.
- Kementerian ATR/BPN. (2021). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

- Supriyadi, T. & Aminah, S. (2023). "Peran Multipihak dalam Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan yang Baik", *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 123–138.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve. Hal. 39–41.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hal. 43–44.
- A.P. Parlindungan, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1981, hlm. 45-46; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 4 ayat (2).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 160-163; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Badan Pertanahan Nasional, *Pedoman Penggunaan Tanah dan Tata Ruang*, Jakarta: BPN, 2017.

Jurnal Ilmiah

- Cry Tendean (2016). "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Akibat Hibah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria." *Lex Privatum*.
- Irmadevita.com (2019). "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah." Artikel ini membahas langkah-langkah dalam proses hibah tanah, termasuk pembuatan akta hibah oleh PPAT dan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Jannah, Siti Khurfatul, and Destri Budi Nugrahen. 2021. "Pertimbangan Hakim Memutus Akta Hibah Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2009 – 2017)" hal 18.
- Jannah, Siti Khurfatul, and Destri Budi Nugrahen. 2021. "Pertimbangan Hakim Memutus Akta Hibah Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2009 – 2017)" .
- Kurniawan, K., & Tanawijaya, H. (2023). Kekuatan Hukum Akta Hibah Atas Tanah dan Bangunan Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor : 236 / PDT / G / 2022 / PN . BKS). *Unes Law Review*, 6(2), 5861.

Ningtyas, Dina Catur Ayu. "Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn: 2776-1916) 3, no. 01 (2023): hal 28-35.

Pakpahan, Elvira Fitriyani, Heriyanti, Rodiatun Adawiyah, Yoshinaga, and Willy Tanjaya. 2024. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TERHADAP ISTRI KEDUA (Studi Kasus Putusan PT Bandung NO.31/PDT/2020/PT.BDG)," 79–87.

Sahono, Linda SM. "Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): hal 90-97.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. (2018). "Prosedur Hibah Tanah dan Bangunan kepada Keluarga." Hukumonline.com.

Victorina, Novinna Maria. 2023. "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Ke Pemerintahan." *Lex Administratum* XI (3).

